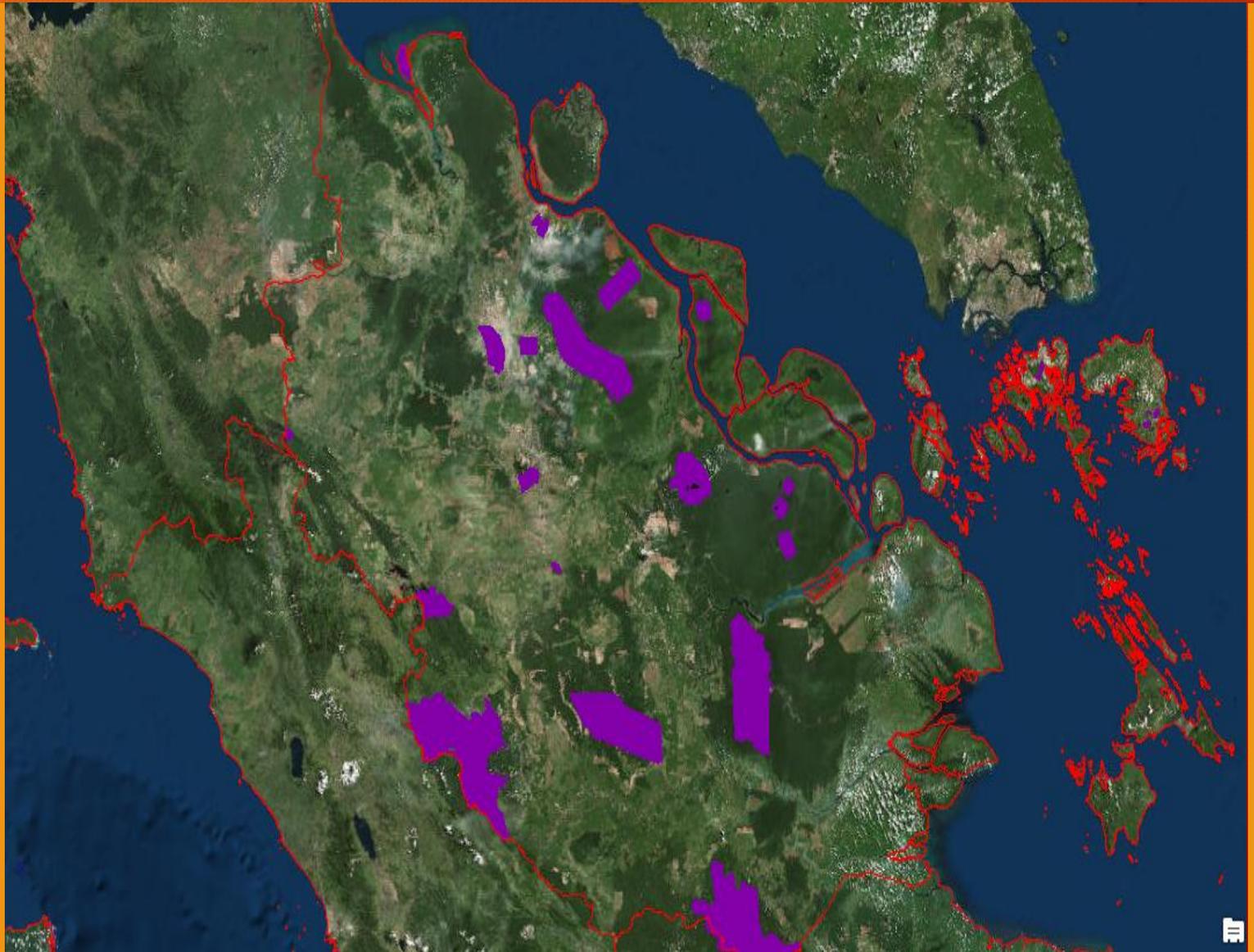


PENGELOLAAN KONSEVASI DI PROV RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

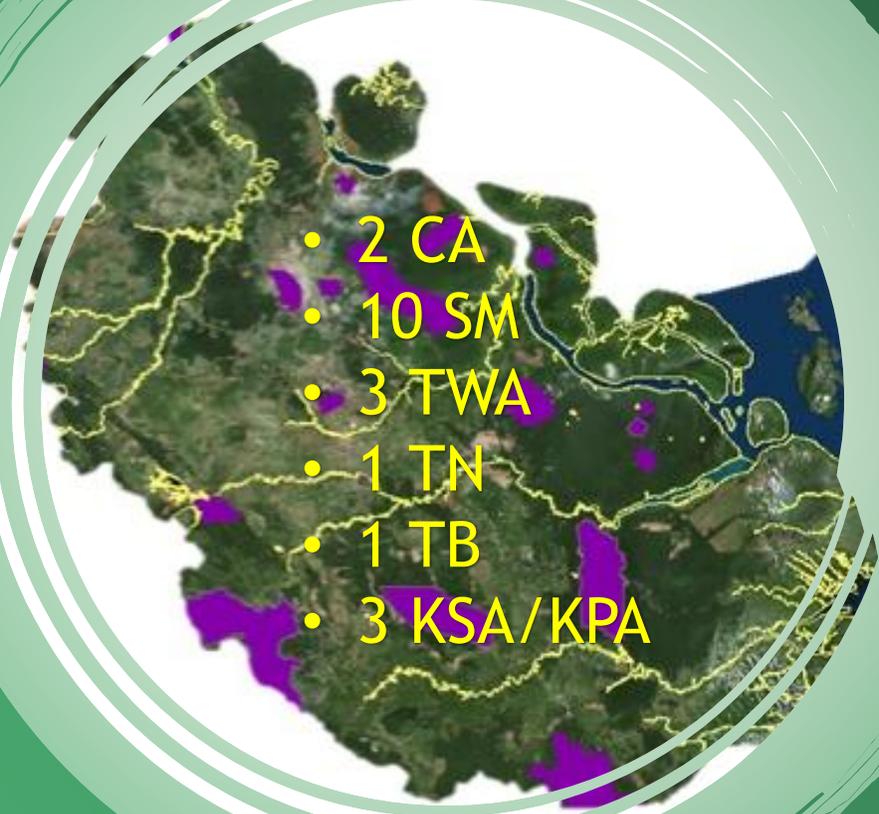


Oleh :
S U H A R Y O N O
KEPALA BALAI BESAR KSDA RIAU



No.	Kawasan Konservasi	Luasan (Ha)
1	TWA Sungai Dumai	4.712,50
2	SM Tasik Tanjung Padang	4.925,00
3	SM Bukit Batu	21.500,00
4	SM Tasik Belat	2.529,00
5	Taman Nasional Zamrud	31.480,00
6	SM Tasik Serkap	6.636,87
7	SM Tasik Besar Serkap	4.978,98
8	TWA Buluh Cina	963,33
9	CA Bukit Bungkok	12.828,88
10	SM Balai Raja	15.343,95
11	SM Kerumutan	95.047,87
12	CA Pulau Berkeh	8.277,67
13	SM Bukit Rimbang Bukit Baling	141.226,25
14	SM Pusat Pelatihan Gajah	5.737,72
15	SM Giam Siak Kecil	78.294,45
16	TWA Muka Kuning	901,79
17	TB Pulau Rempang	5.048,84
18	KSA/KPA gunung Lengkuas	688,88
19	KSA/KPA Sungai Pulai	71,76
20	KSA/KPA Gunung Kijang	462,35
	TOTAL	441.656,09

441.656,09 Ha
(20 KK)



POLICY BUDGETING DAN SDM PENGELOLAAN KK



2018	2019	2020	2021
28.305.553.000	26.344.334.000	31.920.700.000 (Awal) 24.820.508.000 (Refocusing)	36.008.059.000 (Awal) 32.951.403.000 (Refocusing)



Rp. 74, 609,74/Ha

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	Polhut	43
2	PEH	13
3	Penyuluh	3
4	Analisis Pengeolah Keuangan	1
5	Fungsional Umum	45
7	Tenaga Kontrak	65
	JUMLAH	183



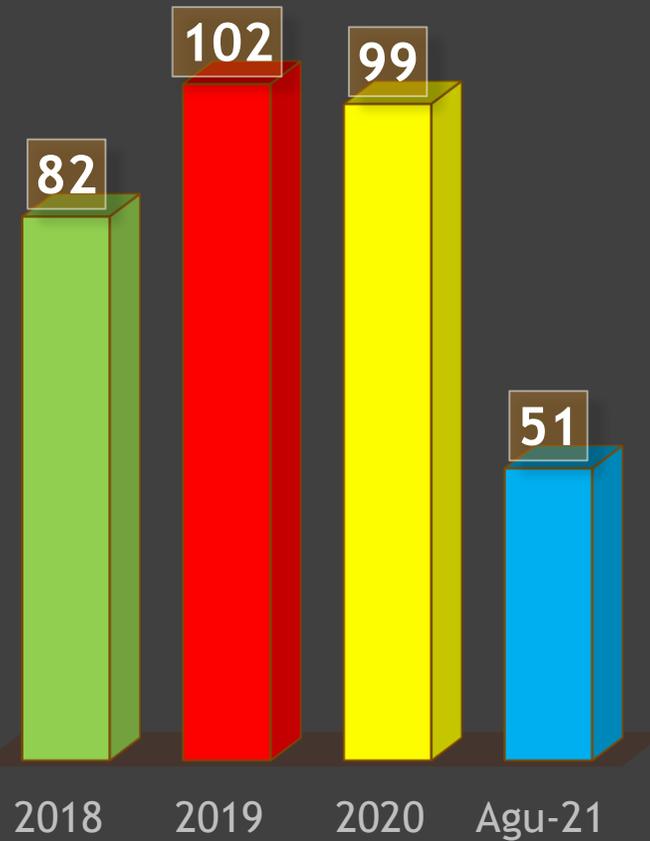
2.413, 42 Ha /Org



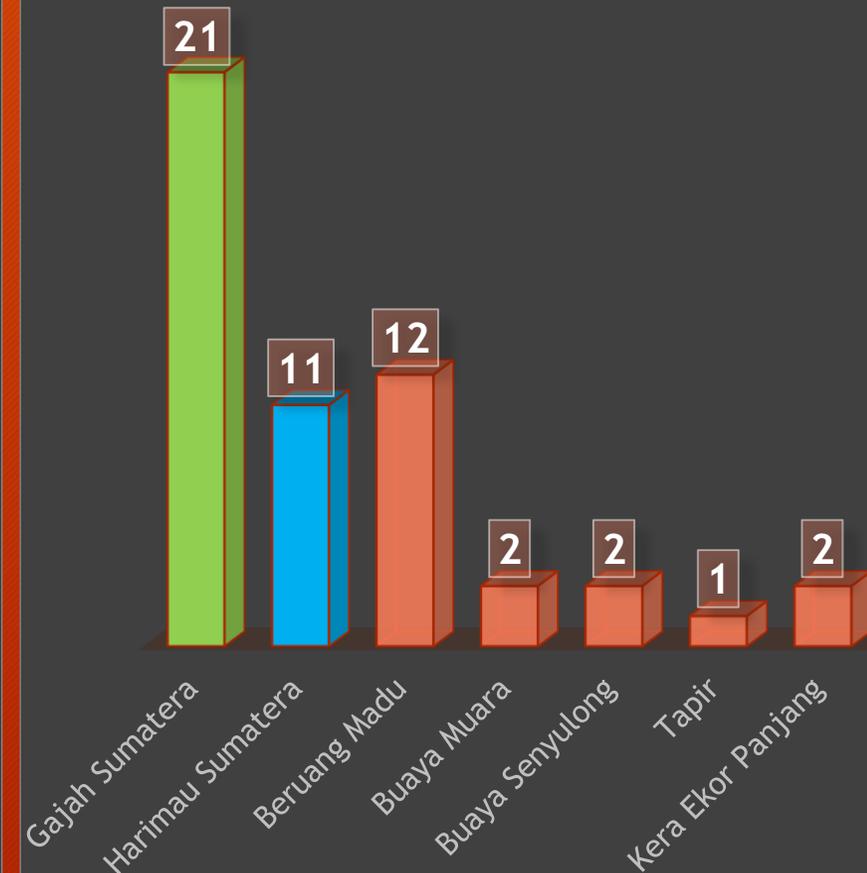
DATA KONFLIK SATWA LIAR



KEJADIAN KONFLIK SATWA LIAR



KONFLIK SATWA LIAR S.D. AGUSTUS 2021

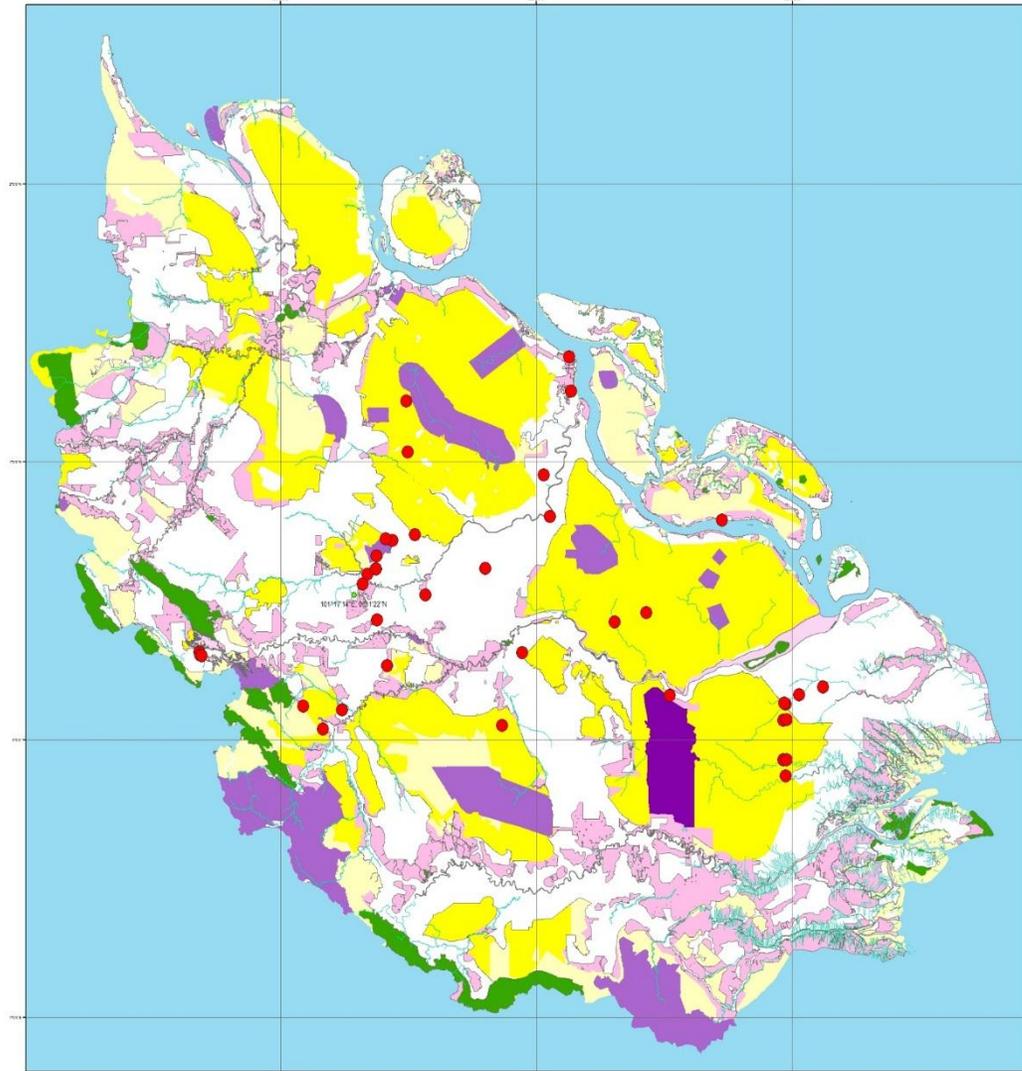




PETA SEBARAN KONFLIK SATWA LIAR

99 %

Konflik Di Luar KK



PETA LOKASI KONFLIK
MANUSIA DENGAN SATWA LIAR
DI PROVINSI RIAU
SKALA : 1:786.546



0 15 30 60 90 120
Kilometers

KETERANGAN :

Sumber :

1. Peta Lampiran SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
2. Peta Penutupan Lahan Baplan, 2015
3. Peta Gambut Wetland Internasional, 2002
4. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
5. Peta Lahan Kritis BPDASHL, 2013

PERLU
KETERLIBATAN
PARA PIHAK DAN
PAYUNG HUKUM



**KEDEPANNYA
DALAM
PENYELAMATAN
KAWASAN
KONSERVASI
JUGA
DIPERLUKAN**

Alokasi Ruang Tanaman Kayu
Kebutuhan Bangunan oleh *privat sector* (pemegang konsesi) bidang kehutanan untuk penyelamatan kawasan konservasi dari ilegal logging yang berujung pada perambahan kawasan

DALAM RANGKA REVISI UU NO 5 TAHUN 1990

1. Perlu penguatan serta **PAYUNG HUKUM** terhadap kegiatan konservasi **DILUAR** kawasan konservasi MELALUI pemberian tanggung jawab *privat sector* (pemegang konsesi) bidang kehutanan dan perkebunan terhadap areal konsesinya. Selain itu dalam penentuan **HCV**, **PERTIMBANGAN UTAMA** adalah **NILAI KONSERVASI**.
2. Penambahan dan **PENGUATAN KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS SERTA PENYIDIKAN** dan tidak ada ketergantungan pada kewenangan penegak hukum lain. Keberadaan satgas penegakan hukum SDA dan E yg selama ini sudah ada yg terdiri LHK, Kejagung dan Polri sebenarnya cukup efektif dlm membangun Criminsl Justice Sistem, namun karena sifatnya yg berupa wadah koordinasi dan tdk permanen, maka kami memandang satgas ini lebih efektif
3. Perlunya **PEMBEBANAN DANA KONSERVASI** kepada para pelaku kegiatan pemanfaatan satwa dilindungi untuk pembinaan habitat aslinya.
4. Konsep **extended family** dalam pengelolaan konservasi kedepan, baik secara institusional, komunitas serta personal dalam **FORMAT KEMITRAAN** juga perlu mendapat payung yang kuat.

Terimakasih



#konservasitakmungkinsendiri